



**Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan program Peningkatan kualitas permukiman
Studi Kasus : Pada Pelaksanaan Program PLPBK di Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan Tenilo Kota Gorontalo**

Mochamad Athar Jantu

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gorontalo
e-mail : athar.jantu@yahoo.com

Abstract

The participation of the community in an implementation of the program or activity greatly affects the success of the program. This participation itself was born because of the factors from inside and outside the individual as members of that community group. This writing is based on a study that takes place in low-income community settlements in Tenilo RT II / RW II Kelota Kelota Gorontalo, Gorontalo Province with the aim of identifying the forms of community participation as well as the factors that influence the participation of the community in the implementation of the quality improvement program which is part of the Community-Based Settlement Environment Management (PLPBK) program by the government in the National Urban Empowerment Community Empowerment Program (PNPM-Mandiri Urban). The method used in this research is by qualitative analysis approach to analyze the primary and secondary data. The study finds that the form of community participation in the implementation of the program of improving the quality of settlements of low income community groups in Tenilo RT II / RW II Kelota District Gorontalo in the form of energy and goods . Internal factors that influence are gender, education, occupation, age, and income, while external factors as the incentive is the willingness, ability and opportunity.

Keywords : Participation, Settlement, Low income groups, Improving the quality of settlements

1. PENDAHULUAN

Menjamurnya permukiman kumuh dan permukiman liar di tengah daerah perkotaan sudah menjadi hal yang “lazim” dijumpai di Indonesia. Fenomena ini timbul akibat pengaruh daya tarik kota yang mampu menciptakan gerak perpindahan penduduk dari daerah menuju kota dan menetap, sehingga ikut membentuk struktur tata ruang dan penampilan sebuah kota. Hal ini terjadi

bukan hanya di kota-kota besar namun juga di kota-kota kecil di Indonesia seperti Kota Gorontalo.

Kualitas hidup masyarakat yang menempati permukiman-permukiman tersebut sudah barang tentu berada pada kondisi yang memprihatinkan karena hidup dalam segala keterbatasan. Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan menerapkan kebijaksanaan melalui program peningkatan kualitas permukiman khususnya permukiman kumuh dan permukiman liar dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di daerah perkotaan. Dalam Undang-undang RI No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pola penanganan terkait peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan tiga cara yakni pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali.

Sejalan dengan hal diatas, kebijaksanaan pembangunan lingkungan pemukiman tidak hanya menyangkut pembangunan prasarana fisik, namun lebih penting lagi adalah pengembangan manusianya itu sendiri yang merupakan titik sentral dari penggerak pembangunan (Wiradisuria 1998 dalam Budiharjo 1998). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat lah yang merupakan subyek dari sebuah program penataan permukiman oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif menentukan keberhasilannya karena pada akhirnya masyarakat tersebut lah yang akan menghuni dan menggunakan permukiman tersebut.

Dengan adanya partisipasi masyarakat ini menurut Conyers (1994) dalam Sulaiman (2005) akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta tumbuh rasa memiliki terhadap hasil-hasil program tersebut, baik partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengembangannya.

Salah satu dari program peningkatan kualitas permukiman adalah program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang merupakan puncak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan). Di Kota Gorontalo program PLPBK ini telah berhasil diterapkan dan dilaksanakan di beberapa kecamatan dan kelurahan. Salah satu penerapan pelaksanaan program ini adalah pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Program peningkatan kualitas pada permukiman tersebut dilakukan dengan cara pembangunan kembali karena kondisi awalnya cukup memprihatinkan karena terdiri dari rumah-rumah semi permanen dengan pola dan orientasi yang tidak teratur serta saling berdempetan satu sama lain sehingga menjadi sebuah lokasi permukiman yang layak huni.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program PLBK di kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo.
- b) Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program PLBK di kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo.

- c) Menganalisis hubungan antara bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan program PLBK di kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai pengarah dan penggerak proses perubahan nasional (Yulianti, 2006). Sebelumnya konsep pendekatan mengenai partisipasi masyarakat dinyatakan oleh Bumberger dan Shams (1989) dalam Ransalele dkk (2013) bahwa terdapat dua pendekatan untuk memahami hal ini yaitu *pertama*, partisipasi merupakan sebuah manifestasi dari proses kesadaran akan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pada kondisi yang kurang beruntung berdasarkan sumberdaya dan kemampuan yang dimilikinya. *Kedua*, disamping peran serta dari masyarakat itu sendiri, partisipasi haruslah mempertimbangkan juga adanya campur tangan dari pemerintah dan LSM.

Dalam mengidentifikasi seberapa jauh bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah program maka perlu dipahami bentuk-bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Menurut Khotim (2004) dalam Ransalele dkk (2013), jenis partisipasi terdiri dari partisipasi ide dan tenaga. Dalam sebuah proses pembangunan, partisipasi ide merupakan bentuk keterlibatan pada tahap awal dalam perumusan, perancangan dan perencanaan kegiatan. Sedangkan partisipasi tenaga adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara fisik dalam pelaksanaan proses pembangunan maupun dalam aktifitas sosial. Secara mendetail, penjabaran dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebelumnya telah diungkapkan oleh Holil (1980) dalam Butar butar dkk (2012) meliputi:

- Pikiran, yakni partisipasi seseorang atau kelompok dengan memberikan pikiran atau ide dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang menjadi keinginan baik dalam penyusunan program serta pelaksanaan program.
- Tenaga, merupakan bentuk partisipasi pada tingkatan kedua dengan memanfaatkan tenaga yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok dalam pencapaian target-target yang menjadi tujuan sebuah program.
- Partisipasi sosial, yaitu bentuk partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai tanda paguyuban dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Keahlian, merupakan bentuk partisipasi menekankan pada pendayagunaan keahlian yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- Barang, yakni bentuk partisipasi yang diwujudkan dalam pemberian atau sumbangan harta benda berupa barang-barang yang dibutuhkan untuk mencapai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program.
- Uang, yaitu bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan uang untuk memperlancar pelaksanaan program sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Bentuk partisipasi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kelompok menengah keatas.
- Pengambilan keputusan, yakni keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat pada sebuah forum diskusi dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan.

- Partisipasi representatif, merupakan bentuk partisipasi melalui cara pemberian mandat kepada wakil dari suatu kelompok yang duduk dalam suatu organisasi.

Faktor individu suatu masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pencapaian yang menjadi target dari suatu program. Faktor individu tersebut merupakan faktor-faktor internal yang menurut Slamet (1993) dalam Butar butar dkk (2012) meliputi:

- Jenis Kelamin
Adanya sistem lapisan sosial yang terbentuk di masyarakat menyebabkan lahirnya perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, hal ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan.
- Usia
Perbedaan tingkatan usia juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan dalam struktur masyarakat terdapat klasifikasi usia yang terwujud dalam bentuk senioritas sehingga memunculkan golongan tua dan muda. Dalam hal ini golongan tua yang sering dianggap memiliki banyak pengalaman dan lebih sering terlibat dalam memberikan pendapat untuk menentukan suatu keputusan.
- Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya sehingga bentuk dan tata cara partisipasi yang diberikan menjadi lebih beragam.
- Tingkat Pendapatan
Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi akan lebih memilih berpartisipasi dengan memberikan uang sedangkan kelompok berpenghasilan rendah cenderung berpartisipasi dengan menggunakan tenaga yang mereka miliki.
- Mata Pencaharian
Berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang serta berpengaruh pada keuangan waktunya untuk dapat berpartisipasi.

Faktor-faktor internal tersebut akan bersinergi dengan faktor eksternal yang merupakan pendorong sehingga lahir partisipasi dari masyarakat. Faktor pendorong tersebut dijelaskan Sumardjo (2009) dalam Ransalele dkk (2013) yakni faktor kemauan (sikap positif terhadap sasaran partisipasi), kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen dan menikmati hasilnya), dan kesempatan (peluang berpartisipasi).

Dalam pelaksanaannya, terkadang ditemui kendala yang menjadikan tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program pembangunan. Kendala tersebut berupa kendala yang berasal dari individu atau masyarakat itu sendiri maupun kendala yang berasal dari luar. Beberapa kendala atau hambatan tersebut menurut Soelaiman (1985) dalam Yulianti (2006) apabila didayagunakan dengan baik akan menjadi faktor pendukung keberhasilan partisipasi, yakni:

- Sikap sosial yang membudaya seperti paternalistik, feodal, superioritas/ dominasi, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi negara namun lebih sebagai penguasa atau raja.
- Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis cenderung mementingkan kesadaran akan kelompoknya saja dan kurang menghargai kelompok lain.

- Adanya sikap ketergantungan dan kepasrahan terhadap nasib sebelum melakukan usaha yang keras.
- Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat terhadap kesenjangan.
- Kemiskinan atau penghasilan yang rendah sehingga waktu dan tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.
- Mobilisasi penduduk yang tinggi terutama yang diakibatkan oleh adanya urbanisasi.
- Ketidak jelasan arah program dan tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis kualitatif. Metode analisis secara lebih dalam digunakan untuk:

- 1) Mengidentifikasi tahapan pekerjaan dalam pelaksanaan program PLPBK di permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II/RW II Kota Gorontalo berdasarkan data-data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, serta data sekunder yakni data-data kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Area permukiman masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi obyek studi berada di wilayah administratif Kelurahan Tenilo RT II / RW II Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar $\pm 349,17 \text{ m}^2$, terletak di dekat lereng bukit dan berada dekat dengan sungai *Bulango*. Status tanah ini adalah milik pemerintah Kota Gorontalo.



Gambar 1: Kawasan Obyek Studi
(Sumber: maps.google.com dan olahan penulis, 2014)

Sebelum dilaksanakan program peningkatan kualitas permukiman, di area permukiman ini terdapat 11 rumah dengan kondisi yang tidak memenuhi standar rumah sehat, beberapa rumah tidak memiliki fasilitas WC dan Kamar Mandi serta tidak tersedianya fasilitas MCK untuk umum.



Gambar 2 : Kondisi Permukiman Sebelum Penataan
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2012)

Masalah utama yang sering dihadapi oleh warga masyarakat yang bermukim di area tersebut adalah jika musim penghujan maka rumah-rumah penduduk akan digenangi air karena menerima limpahan air dari wilayah perbukitan sekaligus luapan air dari sungai *Bulango* yang hanya berjarak ± 20 meter dari area permukiman. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi permukaan tanah permukiman yang berkontur dan lebih rendah ± 1 meter dari permukaan jalan.

4.2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Area permukiman tersebut ditempati oleh 16 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 73 jiwa. Pada beberapa rumah dihuni oleh 2 hingga 3 kepala keluarga didalam satu rumah.

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia

Pembagian Usia (Tahun)	Jlh (Orang)	Presentasi (%)
Balita(0 – 5)	-	0
Anak-anak (5 – 11)	8	10,96
Remaja (12 – 25)	11	15,07
Dewasa (26 – 45)	29	39,73
Lansia 46 – 65	22	30,14
Manula (> 65)	3	4,11
Jumlah	73	100,00

(Sumber: Hasil Studi dan Wawancara, 2014)

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Pembagian Usia (Tahun)	L (Org)	P (Org)	Jlh (Org)
Balita (0 – 5)	-	-	-
Anak-anak (5 – 11)	3	5	8
Remaja (12 – 25)	7	4	11
Dewasa (26 – 45)	12	17	29
Lansia 46 – 65	8	14	22
Manula (> 65)	1	2	3
Jumlah	31	42	73

(Sumber: Hasil Studi dan Wawancara, 2014)

Tingkat pendidikan masyarakat dapat dikategorikan masih sangat rendah, untuk usia anak-anak seluruhnya mengenyam pendidikan tingkat SD, penduduk usia remaja hanya 4 orang yang mengenyam pendidikan SMP dan SMU, sedangkan usia dewasa hingga manula sebagian besar menamatkan pendidikan hingga tingkat SD dan sebagian kecil yang melanjutkan hingga tingkat SMP.

Kondisi ekonomi penduduk sangat memprihatinkan, sebagian besar memiliki pendapatan rata-rata perbulan berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000., sedangkan sisanya pendapatan berada dibawah Rp. 500.000. Jenis pekerjaan yang ditekuni yakni buruh bangunan, penambang pasir, buruh cuci rumah tangga, sedangkan beberapa orang penduduk usia produktif tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Slamet (1993) dalam Butar butar dkk (2012) mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi bentuk partisipasi masyarakat, maka faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan jenis mata pencaharian, dimana tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah maka akan membatasi keragaman bentuk partisipasi yang akan diberikan. Dari faktor tingkat penghasilan, masyarakat memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana, namun peluang untuk berpartisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk barang atau tenaga. Sedangkan dari segi jenis mata pencaharian, karena tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup maka harus dapat berusaha membagi waktu antara ikut serta dalam berpartisipasi dengan mengutamakan pekerjaan.

4.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Dalam setiap bentuk kegiatan di masyarakat, peran BKM sangat berpengaruh sebagai penggerak karena bersifat kolektif dalam merangkul setiap individu dan kelompok masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif sekaligus memonitor secara langsung jalannya pelaksanaan kegiatan. Demikian halnya pada pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman di Kelurahan Tenilo, namun upaya-upaya yang dilakukan oleh BKM tidak akan maksimal tanpa adanya respon dan umpan balik dari masyarakat tersebut.

Respon masyarakat akan menentukan bentuk dan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari individu yang diungkapkan oleh Slamet (1993) dalam Butar butar dkk (2012) yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan penghasilan serta faktor eksternal yang dijelaskan Sumardjo (2009) dalam Ransalele dkk (2013) yakni faktor kemauan (sikap positif terhadap sasaran partisipasi), kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen dan menikmati hasilnya), dan kesempatan (peluang berpartisipasi).

Pada pelaksanaan program PLPBK ini, tahapan kegiatan terbagi menjadi 3 tahap pekerjaan yakni pembongkaran bangunan warga, penimbunan lokasi, dan pembangunan bangunan yang layak huni. Di setiap tahapan pelaksanaan dapat diidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga dan barang.

1. Tahap pembongkaran bangunan

Pada tahap ini masyarakat tidak terlalu banyak berperan untuk membongkar bangunan lama mereka karena sebagian besar pembongkaran

dikerjakan oleh alat berat dibawah koordinasi BKM. Masyarakat lebih berperan dalam membenahi dan mengidentifikasi bahan-bahan sisa bongkaran yang masih dapat digunakan kembali. Pada tahap ini bentuk partisipasi yang bisa diidentifikasi adalah tenaga.

2. Tahap penimbunan lokasi

Material yang digunakan untuk penimbunan lokasi diperoleh dengan melakukan pengerukan bagian bukit yang ada di dekat lokasi pekerjaan. Pada tahap ini hanya sebagian kecil masyarakat kelompok pria usia dewasa dan lansia ikut berperan terutama pada saat menurunkan material tanah timbunan dari kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkut tersebut serta alat berat untuk pekerjaan pengerukan difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo atas inisiatif dan usaha pendekatan yang dilakukan oleh BKM. Sebagian masyarakat lain disibukkan dengan rutinitas pekerjaan sebagai buruh bangunan dan penambang pasir. Bentuk partisipasi yang dapat diidentifikasi adalah tenaga, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah mata pencaharian dan usia.

3. Tahap pembangunan bangunan baru

Pada tahap ini bentuk partisipasi masyarakat diidentifikasi dalam dua bentuk yakni tenaga dan barang. Untuk tenaga, masyarakat khususnya kelompok pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan dan dibantu tenaga tukang dari luar masyarakat tersebut, namun tidak keseluruhan masyarakat ini ikut membantu dikarenakan rutinitas pekerjaan sebagai buruh bangunan di tempat lain sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Partisipasi dalam bentuk barang diwujudkan dalam penggunaan material bongkaran bangunan lama yang masih dapat digunakan seperti seng gelombang untuk penutup atap dan papan untuk pembuatan mal dan bouwplank. Tidak seluruhnya material sisa bongkaran tersebut digunakan karena sebagian dinilai sudah tidak layak pakai. Namun beberapa warga justru memanfaatkan material sisa tersebut untuk di berikan kepada warga sekitar dengan imbalan atau ditukar dengan sejumlah uang.

Pada tahap ketiga ini bentuk partisipasi yang dapat diidentifikasi adalah tenaga dan barang, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah mata pencaharian, usia dan pendapatan.

5. KESIMPULAN

- Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II / RW II adalah berupa tenaga dan barang.
- Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II / RW II yaitu jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan pendapatan, sedangkan faktor eksternal sebagai pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II / RW II yaitu adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan.

- Hubungan antara faktor dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Tenilo RT II / RW II dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor jenis kelamin dan faktor kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Penerbit Alumni, Bandung. 1998.
- Budihardjo, Eko. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2006.
- Butar-butur, D. Catherine dan Rulli Pratiwi, S. *Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Teknik Pomits 1(1): 1-6. 2012.
- Ransalele, K., Rieneke L.E. Sela, R.J. Poluan, dan S. Supardjo. *Partisipasi Masyarakat Kelurahan Ternate Baru dalam Program Perbaikan Permukiman Bantaran Sungai Tondano di Kota Manado*. Jurnal Sabua 5(1): 49-55. 2013.
- Sulaiman. *Proses Partisipasi Dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011. *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Jakarta. 12 Januari 2011.
- Yulianti. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. 2006.